**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, HUMAN RESOURCE COMPETENCY, AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS TO THE QUALITY OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS**

Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy1a

1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

Jl. Ir. M. Putuhen, Kampus Unoatti Poka-Ambon- Kode Pos 972333

a Korespondensi: Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy, E-mail: **philiafina89@gmail.com**

ABSTRACT

This was study aimed to examined the effect of government internal control systems, human resource competencies and the use of accounting information systems on the quality of Local Government Financial Statements. The population of this research are government officer in Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampling was conducted using a judgment sampling method and number of samples are 44 respondents. Technique of data collection is survey by using questionnaires. Analysis using multiple regression analysis. The results showed that human resource competence had a positive and significant effect on the quality of local government financial statements. While the government's internal control system and the use of accounting information systems do not significantly affect the quality of local government financial statements.

Keywords: Accounting information systems, Government internal control systems, human resource competencies, local government financial statements

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intenal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan penggunan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengambilan sampel menggunakan metode judgement sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei dengan mengunakan kuisioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan kuangan daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah dan penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci:Kompetensi SDM, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penulis Pertama., & Penulis kedua. (Tahun terbit). Judul Lengkap Bahasa Indonesia. *Nama Jurnal, Vol*(tahun1/2), halaman pertama- halaman terakhir.

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Karena itu masyarakat mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di Indonesia, sesuai dengan semangat reformasi, tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berkembang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut yakni, partisispasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu upaya konkrit untuk menunjukkan transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip- prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dianggap salah satu entitas pelaporan, yakni unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Lapororan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Sistem akuntabilitas publik memerlukan saluran- saluran pertangungjawaban yang tersistem dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam pemerintahan. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik adalah fungsi audit. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, atau instansi pengelola aset Negara lainnya. (Bastian, 2006). Menurut UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan Pemeriksa Keuangan, 2006). Hasil akhir audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yakni laporan audit yang menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Opini audit tersebt mencakup Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan BPK atas 542 Laporan Keuangan Daerah tahun 2018 menungkapkan opini WTP atas 443 LKPD, opini WDP atas 86 LKPD dan opini TMP atas 13 LKPD (IHPS 1 Tahun 2019). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, khusus untuk tahun 2018 salah satu LKPD yang mengalami penurunan opini adalah LKPD pemerintah Provinsi Maluku dari opini WTP menjadi WDP. Selain itu terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari tahun 2014 hingga tahun 2018 belum memperoleh opini WTP, diantaranya adalah Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepuluan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur (Tabel 1).

**Tabel 1. Daftar Opini BPK Terhadap LKPD Beberapa Kabupaten di Maluku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entitas Pemerintah Daerah | Tahun | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Kabupaten Buru Selatan | TMP | TMP | TMP | TMP | WDP |
| Kabupaten Kepulauan Aru | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | TMP | TMP | TMP | TMP | WDP |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (BPK RI, 2019)*

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tersebut dijelaskan bahwa untuk LKPD yang belum memperoleh opini WTP, karena terdapat akun-aku dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP atau tidak didukung bukti yang cukup. Misalnya untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, akun -akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak memiliki bukti yang cukup meliputi akun aset, baik berupa aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu akun aset lancar, aset tetap, aset lainya, belanja operasi dan belanja modal.

Opini WDP dan TMP untu LKPD pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir mengambarkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah yang merupakan gambaran pengelolaan keuangan daerah selama satu periode belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kualitas LKPD perlu ditingkatkan, sehingga informasi yang dimuat dalam laporan tersebut dapat berguna bagi pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun nasional. Serta menjadi salah satu sarana perwujudan transaparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan sistem informasi akuntansi. Khususnya pada Pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya, yaitu Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

MATERI DAN METODE

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Bastian, 2006)

Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (PP No. 71 Tahun 2010)

**Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat Dipahami (PP No. 71 Tahun 2010)

**Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP No. 60 Tahun, 2008)

Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintaah dikatakan baik jika memenuhi 5 unsur yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

**Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sesuai keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efesien.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) (Nurillah, 2014)

**Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses dan melaporkan informsi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso, Weygandt, & warfield, 2017)

**Sistem Manajemen Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya yaitu program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda terutama dalam penyusunan APBD.

**Pengembangan Hipotesis**

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian Fitri (2016) dan Siwambudi, Yasa, & Badera (2017), membuktikan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik dan akan menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H1: Sistem Pengendalaian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

Penelitian Triyanti (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rusvianto, Mulyani, & Yuliafitri (2018), yang melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung juga berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, secara berkala mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokoknya serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten di OPD akan sangat berperan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H2: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

Undang-Undang No. 33 Tahun (2004) Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Sistem informasi akuntansi yang digunakan pada Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah SIMDA, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan peranan/pemanfaatan SIMDA terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

*H3: Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah*

**Model Penelitian**

SPIP

Kompetensi SDM

Kualitas LKPD

Penggunaan SIA

Gambar 1. Model Penelitian

**Populasi dan Sampel**

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai OPD Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. Kriteria yang digunakan bagi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pegawai OPD yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan laporan keuangan, meliputi kepala OPD, kepala bagian atau sub bagian dan bendahara OPD yang melakukan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, yaitu bendara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengurus barang.

**Teknik Pengumpulan dan Jenis Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei. Dengan teknik survei, data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan persepsi mereka terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, kompetensi dan penerapan SIA di lingkungan atau instansi tempat mereka bekerja.

**Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas), variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen yaitu:

Sistem pengendalian intern pemerintah (X1), yaitu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Variabel ini diukur dengan 8 item pertanyaan sesuai dengan komponen-komponen sistem pengendalian intern.

Kompetensi Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efesien. Terdapat 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi SDM.

Pengunaan sistem informasi akuntansi (X3), yaitu penggunaan program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, meliputi relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

**Metode Analisis Data**

Sebelum memasuki proses analisis, data yang dikumpulkan perlu diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing pertanyaan telah dikelompokkan pada variabel yang telah ditentukan untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing variabel pengujian dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha.* Suatu konstruk dikatakan apabila releiabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60 (Nunnaly, 1967; (Ghozali, 2016). Selanjutnya dilakukan uji asusmsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Teknik analisa data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah model analisis regresi linear berganda. Persamaanya adalah sebagai berikut:

**Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e**

Dimana :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y | = | Kualitas Laporan Keuangan |
| X1 | = | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| X2 | = | Kompetensi Sumber Daya Manusia |
| X3 | = | Sistem Informasi Akuntansi |
| α | = | Konstanta |
| β | = | Parameter |
| e | = | Error term |

Ketetapan fungsi regersi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*- nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya (Kuncoro, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan uji validitas diketahui korelasi antara masing-masing indikator/item untuk variabel sistem pengendalaian intern, kompetensi SDM, pengunaan Sistem Informasi Akuntansi, dan kualitas LKPD tingkat signifikansinya < 0,01 dan < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator/item pertanyaan dalam variabel penelitian ini adalah valid. Selanjutnya ntuk uji reiabilitasuntuk keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena seluruhnya memiliki nilai cronbach alpha > 0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal ataukah tidak. (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov – Smirnov*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov – Smirnov* adalah 0,612 dan probabilitasnya 0,848. Nilai probabilitas 0,848 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolnearitas menunjukan untuk sistem pengendalian intern, kompetensi SDM, penggunaan sistem memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya tidak lebih dari 10. Artinya tidak terdapat korelasi antara variabel- variabel independen tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas melalui grafik tampilan grafik scatterplot (Ghozali, 2016). Dalam tampilan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan sebarannya berada diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi atau tidak ada pola yang jelas, sehingga model ini layak di pakai.

**Uji Hipotesis dan Pembahasan**

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Β | *t-value* | t-tabel | Sig |
| (Constant) | 14,381 | 2,681 | 1,6838 | 0,011 |
| Sistem Pengendalian Intern | -0,129 | -0,821 | 1,6838 | 0,416 |
| Kompetensi SDM | 0,630 | 3,313 | 1,6838 | 0,002 |
| Penggunaan SIA | 0,210 | 0,510 | 1,6838 | 0,613 |
| F-Value | 4,882 |  | | |
| Sig | 0,006 |  | | |
| R2 | 0,266 |  | | |
| Adjusted R2 | 0,211 |  | | |

Hipotesis pertama (H1) menyatakan sistem pengendalaian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian (tabel 2) menunjukan nilai t hitung -0,821 lebih kecil dari nilai t tabel 1,6838 dan nilai probabilitas 0,416 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini membuktikan pada Pemerintah Kabupateen Maluku Barat Daya, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitaas laporaan keuangan, sejalan dengan penelitian S Purnomo (2014) pada Kabupaten/Kota Wilayah I Bogor. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya tidak mampu mendukung terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Untuk itu pemerintah diharapkan perlu memperhatikan implementasi sistem pengendalian intern pada seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian (tabel 2) menunjukan nilai t hitung 3,313 lebih besar dari nilai t tabel 1,6838 dan nilai probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan instrumen pertanyaan yang digunakan dapat dinyatakan bahwa SDM yang berkompeten dapat diketahui dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan semakin baik ketika Sumber Daya Manusia yang menghasilkan laporan tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang oleh, Triyanti (2017), Fitri (2018), yang menunjukkan kompetensi sumber daya mausia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem manajemen daerah (SIMDA) yang merupakan aplikasi SIA yang dikembangkan oleh BPKP untuk diaplikasikan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil pengujian menunjukan bahwa Nilai t hitung 0,513 lebih kecil dari nilai t tabel 1,6838 dan nilai probabilitas 0,613 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pengguna SIMDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum mampu memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dengan efektif dan efisien sehingga tidak mampu berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 juga diketahui, nilai F sebesar 4,882 dan nilai probabilitasnya 0,006. Karena tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa perubahan variabel independen dalam model yaitu sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Besarnya nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) adalah 0,211. Hal ini berarti bahwa 21,1% variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan sisstem informasi akuntansi. Sedangkan sisanya 78,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh maka disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daeraah Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan sistem pengendalian intern dan pegunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi pegawai yang memdai memberikan kontribusi yang baik terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun pada sisi lain hasil penelitian ini juga menunjukkan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak mampu mendukung terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu pengunaan aplikasi SIMDA dalam menghasilkan laporan keuangan juga belum dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, Untuk itu pemerintah diharapkan perlu memperhatikan implementasi sistem pengendalian intern pada seluruh organisasi perangkat daerah, maupun pengunaan aplikasi SIMDA oleh setiap OPD dan badan pengelola keuangan daerah sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun bagi peneliti berikutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor lainnya yang lebih lengkap untuk penelitian pada instansi pemerintah lainnya. Sehingga pemahaman dan generalisasi terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah lebih komperhensif, khususnya untuk pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP dari BPK

DAFTAR PUSTAKA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654*, 1–25.

Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta: Andi*.

BPK RI. (2019). IHPS I Tahun 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*, 1–426. Retrieved from https://www.bpk.go.id/ihps#

Fitri, Y. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Binjai dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.

Kieso, Weygandt, & warfield. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting. *Salemba Empat*.

Kuncoro, mudrajad. (2010). Metode kuantitatif : teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi. *System*.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.

Nurillah, M. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKd), Pemanfaatn Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok).

Peraturan Pemerintah. (2008). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. In *pp*. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–30. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banque Syar’i*, *4*(1), 33–67.

S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 276. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581

Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Triyanti. (2017). *AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang ) THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE IN THE FIELD OF*. (3), 1–16.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. , CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison § (2004).